

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dari beberapa karya tulis yang terkait dengan pengaruh terhadap kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Pasar Perusahaan Perbankan, Novia Wijaya (2012)	Kinerja keuangan, nilai pasar dan VAIC (VACA, VAHU, STVA)	Regresi linier berganda	<i>Capital employed efficiency</i> berpengaruh terhadap <i>profitability</i> , sedangkan <i>human capital efficiency</i> dan <i>struktural capital efficiency</i> tidak berpengaruh terhadap <i>profitability</i> . <i>Capital employed efficiency</i> berpengaruh terhadap <i>productivity</i> , sedangkan <i>human capital efficiency</i> dan <i>struktural capital efficiency</i> tidak berpengaruh terhadap <i>productivity</i> . <i>Capital employed efficiency</i> , <i>human capital efficiency</i> dan <i>struktural capital efficiency</i> berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan.

2.	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> , CSR dan GCG Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015), Gusti Ayu Ariantini, Gede Adi Yuniarta Dan Edy Sujana (2017)	Kinerja perusahaan (ROE), <i>Intellectual Capital</i> , CSR dan GCG	Regresi Linier Berganda	<i>Intellectual Capital</i> dan CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROE), sedangkan GCG (ukuran dewan komisaris) tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROE). <i>Intellectual Capital</i> , CSR dan GCG secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROE)
3.	<i>The Influence Of Intellectual Capital On The Company Financial Performance (Case study on company electronic, automotive and components listed in IDX on period 2011-2015)</i> , Bunga Ekawati, Khairunnisa dan Eddy Budiono (2017)	Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA), VACA, VAHU dan STVA	Analisis statistik deskriptif dan analisis jalur dengan model kolerasi	VACA dan STVA memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan VAHU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel <i>Intellectual Capital</i> (VACA, VAHU dan STVA) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA).
4.	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Profitabilitas dan Dampaknya Terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di BEI, Abdul Halim, Hasan Basri dan Faisal (2016)	ROE, EPS, Harga Saham, dan <i>Intellectual Capital</i>	Analisis regresi dan <i>path analysis</i>	<i>Intellectual Capital</i> berpengaruh terhadap profitabilitas dan harga saham. Profitabilitas mempengaruhi harga saham. <i>Intellectual Capital</i> dan provitabilitas mempengaruhi harga saham.
5.	Analisis Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Performance</i> , Nora Riyanti Ningrum dan	Kinerja keuangan perusahaan, <i>Intellectual Capital</i> (VAIC, kepemilikan manajeral, kepemilikan	regresi berganda atau <i>multiple regression</i>	Variabel <i>Intellectual Capital</i> yang diukur dengan VAIC berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas ROA. Kepemilikan saham institusional dan kepemilikan saham manajeral tidak

	Shidiq Nur Raharjo (2012)	institusional dan proporsi komisaris independen		berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA. Proposi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROA, namun dengan arah negatif
6.	<i>Mediating Effect Of Intellectual Capital On The Relationsips Between Information Technology For Human Resource, It For Market Information An It For Marketing Caommunication On Performance Of Banking Sector In UAE, Hamad Salmen and Haim Hilman (2017)</i>	<i>Bank performance, intellectual capital as mediating factor</i>	<i>Smart - PLS statistical software</i>	<i>Practial contributions, study show to top manager the importance of ITMI, ITHR, ITMC, intelectual capital and how to use them efectively on performance of bank to implement the strategies an improve the systems. The banking sector should focus on management practices that related to technologies, programs, and applications starting to improve the performance.</i>
7.	<i>The Impact Of Intellectual Capital Toward Firm's Profitability And Market Value Of Retail Companies Listed In IDX From 2013-2016, Richard Suherman (2017)</i>	<i>profitability, market value, intelectual capital as namely, human capital, structural capital and relational capital</i>	<i>reliability and validity, regression model, assumption of multiple regression, testing for significance and coeffivient of determinati on</i>	<i>Intelectual capital have a significant impact toward firm's profitability an have an insignificant impact toward market value. Test conducted on the components of intelectual capital also show that only human capital has a significant impact toward firm's profitability an only human capital and structural capital have a significant impact toward markert value.</i>

Berdasarkan dari penelitian – penelitian terdahulu, maka penelitian ini merupakan replika dari penelitian Gusti Ayu Ariantini, Gede Adi Yuniarta dan Edy Sujana (2017). Persamaan dari jurnal penelitian yang ambil adalah dari sisi jenis penelitiannya yang merupakan penelitian kuantitatif dan

sama-sama menggunakan variabel independen yaitu *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* serta menggunakan sampel perusahaan yang *listing* di BEI. Sedangkan perbedaan penelitian adalah :

1. Variabel Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Ariantini, Gede Adi Yuniarta dan Edy Sujana (2017) kinerja keuangan menggunakan proksi ROE. Sedangkan penelitian ini, kinerja keuangan menggunakan proksi ROA yang umumnya sering digunakan oleh mayoritas perusahaan.

2. Populasi dan Objek Penelitian

Populasi pada penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Ariantini, Gede Adi Yuniarta dan Edy Sujana (2017) adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yaitu sebanyak 31 perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yaitu sebanyak 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Alasan memilih perusahaan sektor dasar dan kimia karena perusahaan ini berperan dalam menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat dan perusahaan lainnya. Perusahaan ini juga berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi salah satu variabel CSR dalam penelitian ini.

3. Periode Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Ariantini, Gede Adi Yuniarta dan Edy Sujana (2017) menggunakan periode 2011-2015. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode 4 tahun saja, mulai tahun 2013-2016. Karena pada tahun tersebut banyak terjadi kasus yang berhubungan dengan sumber daya alam yang terkait dengan salah satu variabel CSR. Sehingga diharapkan akan memberikan manfaat bagi *stakeholder*, pasar modal, masyarakat dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam pengambilan keputusan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan dengan *stakeholder*. Dalam teori disebutkan bahwa semua *stakeholder* memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktifitas perusahaan yang mempengaruhi mereka (Widarjo, 2011). Teori ini lebih mementingkan posisi *stakeholder* dari pada *shareholder*, karena *stakeholder* memiliki posisi yang dipandang lebih berpengaruh. Kelompok ini menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan untuk mengungkapkan atau tidaknya suatu informasi dalam laporan keuangan. Kelompok *stakeholder* tidak hanya pelaku usaha dan pemegang saham perusahaan, tetapi juga para karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah,

masyarakat dan lingkungan dalam segala aspek kegiatan operasional perusahaan.

Tidak hanya untuk kepentingan sendiri, namun perusahaan harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Untuk memenuhi tuntutan para *stakeholder* tersebut, *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu strategi bagi perusahaan. Para *stakeholder* akan memberikan dukungan kepada aktivitas perusahaan, apabila implementasi CSR dapat dilakukan dengan baik. Maka tujuan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba dapat tercapai. Finch (2005) menyatakan bahwa CSR adalah bentuk kinerja manajemen untuk mencapai keuntungan jangka panjang perusahaan kepada para *stakeholder*, seperti perbaikan kinerja keuangan, kenaikan dalam *competitive advantage*, peningkatan laba dan perkembangan perusahaan dalam jangka panjang.

Tujuan utama dari *theory stakeholder* adalah untuk membantu manager keuangan dalam melakukan pengelolaan perusahaan agar lebih efektif. Namun demikian, tujuan yang lebih luas adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam memaksimalkan nilai dari dampak aktifitas-aktifitas mereka dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi *stakeholder*.

2.2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini menjelaskan korelasi antara *principal* dan *agent*. *Principal* yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham, sedangkan *agent* yaitu manajer perusahaan. Korelasi keagenan adalah suatu kontrak atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dimana satu atau lebih *principal* dapat memerintah *agent* untuk melakukan jasa atas nama *principal* dan memberikan wewenang kepada *agent* dalam menciptakan keputusan terbaik bagi pihak *principal*.

Agency theory merupakan konsep dasar dari penerapan *corporate governance*. *Corporate governance* berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan *principal* terhadap *agent* perusahaan. Dimana *agent* tidak akan melakukan kecurangan (*fraud*) dan berkaitan dengan kewenangan para *agent* untuk mengelola perusahaan, sehingga memberikan keuntungan bagi *principal* (Sam'ani, 2008).

2.2.3 *Resource Based Theory*

Berdasarkan penerapan konsep *resource based theory*, apabila perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, maka dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Menurut Barney (1991) dalam Chen (2005), sumber daya yang dimaksud harus memiliki kriteria VRIN (*Valuable, Rare, Imperfect Imitability, dan Non-Substitution*).

Penjelasannya dari karakteristik VRIN tersebut adalah sebagai berikut: (a) *Valuable* (berharga) yaitu sumber daya perusahaan dikatakan

berharga, jika memberikan nilai positif dan nilai strategis bagi perusahaan sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjangkau peluang pasar; (b) *Rare* (langka) atau unik yang dimaksud adalah sulit ditemukan, dimiliki dan dimanfaatkan pesaing sehingga memerlukan biaya besar dan waktu yang lama untuk memperolehnya, atau membutuhkan investasi modal yang besar untuk memilikinya; (c) *Imperfect Imitability* (sulit ditiru atau peniruan yang tidak sempurna) artinya sumber daya yang sulit untuk ditiru atau apabila ditiru hasilnya tidak sempurna, sehingga sulit untuk diperbanyak atau diimitasi. Artinya, perusahaan yang memiliki sumber daya tersebut dapat menciptakan inovasi produk maupun jasa yang diperlukan oleh konsumen tanpa pesaing yang mempunyai sumber daya yang sama; (d) *Non-substitution* (tidak ada substitusi atau tidak ada pengganti) adalah sumber daya yang tidak dapat digantikan dengan sumber daya lain.

Karakteristik dari VRIN dapat digunakan menciptakan *value added* bagi perusahaan. Menurut *resources based theory*, nilai *intellectual capital* sebagai salah satu kunci bagi suatu perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Kuryanto dan Syafruddin, 2008).

2.2.4 Signalling theory

Menurut Brigham dan Houston (2004) signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini

berupa informasi yang dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.

Signaling theory menjelaskan alasan perusahaan memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Yaitu karena perusahaan mengetahui lebih baik mengenai perusahaannya dan prospek yang menguntungkan di masa yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka memberikan harga yang rendah kepada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengurangi informasi asimetri dengan memberikan sinyal pada pihak luar.

Begitu juga dalam penilaian kinerja keuangan, perusahaan juga harus memberikan sinyal kepada pemakai laporan keuangan termasuk masyarakat luas, sehingga mereka dapat menilai perusahaan memiliki kinerja yang bagus atau tidak. Perusahaan dapat memberikan sinyal berupa seberapa tinggi keuntungan yang dicapai perusahaan ataupun berupa informasi-infromasi yang terkait mengenai kinerja keuangan perusahaan tersebut (Tampubolon, 2015).

2.3 Tinjauan Literatur

2.3.1 *Intellectual Capital*

2.3.1.1 Definisi *Intellectual Capital*

Sampai saat ini, definisi modal intelektual sering kali dimaknai berbeda-beda. Sebagai sebuah konsep, *intellectual capital* atau modal intelektual merujuk kepada modal-modal tidak berwujud

(*intangible assets*) yang mana terkait dengan pengetahuan manusia atau teknologi yang digunakan.

Menurut Nurhayati (2017) *intellectual capital* adalah asset tak berwujud yang memegang peran penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan dan dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Terdapat 3 konstruk utama dari *intellectual capital* yaitu: *human capital (HC)*, *structural capital (SC)* dan *customer capital (CC)* (Bontis *et al.*, 2002 dalam Ulum *et al.*, 2008).

Menurut Gozali dan Saerce (2014) *intellectual capital* sebagai keseluruhan dimensi dari perusahaan, yaitu relasi dengan pelanggan, tenaga kerja perusahaan dan prosedur pendukung yang diciptakan dengan adanya inovasi, modifikasi pengetahuan saat ini, transfer ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berkelanjutan yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

Menurut Rosalia *et al.*, (2015), *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* mendeskripsikan *intellectual capital* sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aktiva tidak berwujud perusahaan, yaitu *organizational (structural) capital* dan *human capital*. (Soetedjo dan Mursida, 2014) menambahkan pemahaman atas komponen - komponen yang mambentuk modal intelektual menjadi sangat penting mengingat komponen tersebut jika dikelola dengan baik dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam

menciptakan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *intellectual capital* merupakan keseluruhan modal yang dimiliki dari 3 elemen utama suatu perusahaan (*human capital, structural capital, customer capital*) yang mana hal-hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang bisa memberikan nilai lebih yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2.3.1.2 Komponen *Intellectual Capital*

Menurut Rosalia et al., (2015) *intellectual capital* dibentuk dalam 3 komponen yaitu:

a) *Human Capital* (modal manusia)

Human capital merupakan *lifeblood* dalam modal intelektual. Disinilah sumber inovasi dan *improvement* (perbaikan). Namun merupakan komponen yang sulit untuk diukur. *Human capital* juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi dalam suatu perusahaan. *Human capital* ini mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut.

Human capital akan meningkat, jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. *Human capital* terdiri dari pendidikan, pengetahuan dan

kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan, kualifikasi kejuruan, semangat kewirausahaan, kemampuan reaktif, inovatif, proaktif dan kemampuan merubah suatu masalah menjadi suatu peluang bisnis.

b) *Structural Capital* (modal organisasi)

Structural capital merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. Misalnya sistem operasional perusahaan, proses *manufacturing*, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki perusahaan.

Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi. Tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk, maka *intellectual capital* tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

c) *Customer Capital* (modal pelanggan)

Customer capital merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari pemasok yang handal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan

perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar.

Customer capital dapat muncul dari luar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut. *Customer capital* terdiri atas merk, pelanggan, loyalitas pelanggan, nama perusahaan, jaringan distribusi, kolaborasi bisnis, perjanjian lisensi, kontrak yang menguntungkan dan perjanjian *franchise*.

2.3.1.3 Indikator *Intellectual Capital*

Metode VAICTM yang dikembangkan oleh Pulic (1998) dalam Ulum (2009). Didesain untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari aset berwujud (*tangible assets*) dan aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang dimiliki perusahaan. VAICTM merupakan instrumen untuk mengukur kinerja *intellectual capital* perusahaan. Pendekatan ini relatif mudah dilakukan, karena dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan (neraca, laba rugi, CALK).

Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added*. *Value Added* (VA) adalah indikator untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (*value creation*). VA dihitung sebagai selisih antara *output* dan *input*. *Output* merupakan seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan *input* merupakan

seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh pendapatan kecuali beban karyawan.

Hal penting dalam model ini adalah bahwa beban karyawan (*labour expenses*) tidak termasuk di dalam *input*. Karena peran aktifnya dalam proses *value creation, intellectual potential* (yang direpresentasikan dengan *labour expenses*) tidak dihitung sebagai biaya (*cost*) dan tidak masuk dalam komponen input. Karena perlakuan terhadap tenaga kerja dianggap entitas sebagai penciptaan nilai (*value creating entity*).

Value added (VA) intellectual capital dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu *Human Capital (HC)*, *Capital Employed (CE)* dan *Structural Capital (SC)*. *Value Added Human Capital (VAHU)* adalah kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan nilai bagi perusahaan dari dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tersebut. *Value Added of Capital Employed (VACA)* adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari *physical capital*. Pulic menjelaskan bahwa jika 1 unit dari CE menghasilkan *return* yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, berarti perusahaan tersebut unggul dalam memanfaatkan CE (dana yang tersedia).

Sedangkan *Structural Capital Value Added (STVA)* menunjukkan kontribusi *structural capital (SC)* dalam penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan menjelaskan bagaimana

kontribusi SC dalam penciptaan nilai. SC bukanlah ukuran yang independen sebagaimana HC, tetapi dependen terhadap *value creation*. Artinya semakin besar kontribusi HC dalam *value creation*, maka akan semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut. SC adalah VA dikurangi HC. Selanjutnya dalam menentukan besarnya nilai *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC™) adalah dengan menambahkan semua hasil *Value Added Human Capital* (VAHU), *Value Added Capital Employed* (VACA) dan *Structural Capital Value Added* (STVA) yang telah diperoleh tadi.

Secara lebih ringkas, formulasi dan tahapan perhitungan VAIC™ yang dikembangkan oleh Pulic (1998) dalam Ulum (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama : Menghitung *Value Added* (VA)

$$\mathbf{VA = Output - Input}$$

Dimana:

VA : Kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah

Output : Pendapatan dan seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar

Input : Seluruh biaya perusahaan, kecuali gaji karyawan

- b. Tahap Kedua : Menghitung *Value Added Capital Employed* (VACA)

VACA adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari *physical capital*. Menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap *value added* organisasi.

$$\mathbf{VACA = VA / CE}$$

Dimana:

VACA : *Value Added Capital Employed*

VA : Nilai tambah perusahaan

CE : Dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih)

- c. Tahap Ketiga : Menghitung *Value Added Human Capital* (VAHU)

VAHU menunjukkan berapa banyak VA yang dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap *value added* organisasi.

$$\mathbf{VAHU = VA / HC}$$

Dimana:

VAHU : *Value Added Human Capital*

VA : Nilai tambah perusahaan

HC : Total gaji dan upah karyawan.

- d. Tahap Keempat: Menghitung Structural Capital Value Added (STVA)

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai.

$$\text{STVA} = \text{SC} / \text{VA}$$

Di mana:

STVA : *Structural Capital Value Added*

SC : Modal struktural (VA - HC)

VA : Nilai tambah perusahaan

- e. Tahap Kelima : Menghitung *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM)

VAICTM mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi. VAICTM merupakan penjumlahan dari 3 komponen sebelumnya yaitu : VACA, VAHU dan STVA.

Jadi rumus VAICTM menurut Pulic (1998) dalam Ulum (2009) sebagai berikut:

$$\text{VAIC}^{\text{TM}} = \text{VACA} + \text{VAHU} + \text{STVA}$$

Keunggulan metode VAICTM adalah data yang dibutuhkan relatif mudah diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan. Data yang dibutuhkan untuk menghitung adalah laporan keuangan perusahaan. Alternatif pengukuran *Intellectual Capital* lainnya terbatas, hanya menghasilkan indikator keuangan dan non-keuangan yang melengkapi profil

suatu perusahaan secara individu. Indikator-indikator tersebut, khususnya indikator non-keuangan, biasanya tidak tersedia atau tidak tercatat oleh perusahaan yang lain (Tan *et al.*, 2007 dalam Ulum, 2009). Konsekuensinya, untuk menerapkan pengukuran *Intellectual Capital* alternatif tersebut digunakan secara konsisten terhadap sampel yang besar dan terdiversifikasi menjadi terbatas.

2.3.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.3.2.1 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan di Amerika disebut dengan *corporate citizenship*. Pada intinya, keduanya dianggap sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan serta merupakan cara perusahaan dalam berinteraksi dengan *stakeholder* secara sukarela. Selain itu, tanggungjawab sosial perusahaan juga diartikan sebagai komitmen bisnis yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan (Rahman, 2009).

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional yang

berasal dari 30 negara, mendefinisikan CSR sebagai *continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*. CSR dimaknai sebagai komitmen bisnis untuk berperilaku etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya serta masyarakat lokal dan umum (Rudito dan Melia, 2013).

Pertanggungjawaban sosial merupakan aktifitas perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi antar aspek ekonomi, lingkungan dan sosial tanpa mengesampingkan ekspektasi para pemegang saham dalam menghasilkan profit (Mustafa dan Nur, 2014).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan bentuk tindakan yang dilakukan perusahaan kepada pemangku kepentingan yang terkena pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan bisnis perusahaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan hukum dan norma yang berlaku.

2.3.2.2 Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility sebagai sebuah gagasan. Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak

pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial* saja), tetapi harus berpijak pada *triple bottom lines*. Dimana selain *financial* juga ada sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja dianggap tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (Candrakirana, 2009).

Berikut ini kegiatan CSR sesuai dengan *Triple bottom line*, antara lain:

Tabel 2.2
Kegiatan CSR Triple Bottom Line

No.	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (kesejahteraan karyawan), kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.
3.	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Sumber : Candrakirana (2009)

Selain konsep CSR diatas, terdapat konsep CSR yang dikembangkan oleh Carrol (1979) dalam Candrakirana (2009) yang disebut dengan piramida CSR. CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah

triple bottom line, yaitu:

1. ***Profit***

Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.

2. ***People***

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.

3. ***Planet***

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup dan penyediaan sarana pengembangan pariwisata.

2.3.2.3 Indikator Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan standar untuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang ada di Indonesia. Sebelumnya standar GRI yang terbit adalah GRI G3.1 pada tahun 2011 yang memiliki 84 indikator. Namun saat ini standar

GRI memiliki versi terbaru yaitu G4 yang diterbitkan pada Mei 2013 dan telah banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia. GRI G4 merupakan penyempurnaan dari GRI sebelumnya yang memiliki 91 indikator, sehingga GRI-G4 ini menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandardisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi perusahaan yang diperlukan untuk membuat informasi yang akan disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Pada dasarnya yang membedakan kedua pengukuran ini terletak pada periode waktu (tahun) objek yang akan diteliti. Sehingga dari periode waktu tersebut dapat diketahui apakah data penelitian ini menggunakan pengukuran GRI G3.1 atau GRI G4. Namun dapat dikatakan hasil akhir yang diperoleh dari kedua pengukuran tersebut sama.

Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan, baik bagi yang berpengalaman dan yang baru dalam pelaporan keberlanjutan dari sektor apapun yang didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya. GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda, seperti: laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu atau pelaporan online (www.globalreporting.org).

Pengukuran GRI melalui isi laporan tahunan dengan aspek-aspek penilaian tanggungjawab sosial yang dikeluarkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) yang diperoleh dari website (www.globalreporting.org). Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan *sustainability reporting*. Dalam standar GRI-G4, indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial yang mencakup: praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, tanggung jawab atas produk dengan total kinerja indikator mencapai 91 indikator. Berikut ini penjelasan mengenai indikator GRI-G4 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.3
91 Indikator berdasarkan GRI-G4

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan pasti
	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di operasi yang signifikan

Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktik Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat dan volume
	EN2	Presentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Presentase dan total volume air yang di daur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati	E11	Lokasi - lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN12	Uraian dampak signifikansi kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi d kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN RED LIST dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)

	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NO _x , SO _x , dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan Basel 2 lampiran I, II, III dan VIII yang diangkut diimpor, diekspor atau diolah dan presentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran dan status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari bahan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
	EN28	Presentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan lainnya
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional dan pengangkutan tenaga kerja
Lain - lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Assesmen Pemasok atas Lingkungan	EN32	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL		
Sub Kategori : Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja		

Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan <i>turn over</i> karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat resistensi setelah cuti melahirkan menurut gender
Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Presentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian formal serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata pertahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk untuk manajemen ketrampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler menurut gender dan kategori karyawan
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan perkatagori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan

		kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-Laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan rantai pasokan dan tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL Sub Kategori : Hak Asasi Manusia		
Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan / prosedur HAM terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan operasi
Non Diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Praktik Pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur HAM di organisasi yang relevan dengan operasi

Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentasi operasi yang telah melakukam review atau assesmen dampak HAM
Asesmen Pemasok atas HAM	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria HAM
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap HAM dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah HAM	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap HAM yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui pengaduan formal
KATEGORI SOSIAL		
Sub Kategori : Masyarakat		
Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan melibatkan masyarakat lokal, dampak dan pengembangan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko tersebut dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti <i>trust</i> serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non moneter atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan
Asesmen Pemasok atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensional yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL Sub Kategori : Tanggungjawab atas Produk		
Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup menurut jenis hasil
Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti informasi sejenis
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsor menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda signifikan atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber : www.globalreporting.org (data diolah, 2018)

Penilaian yang dilakukan dalam mengukur CSR yaitu dengan pemberian skor 0 dan 1. Dimana nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan dan nilai 1 untuk item yang diungkapkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR secara penuh, maka nilai maksimal yang dicapai adalah 91 untuk GRI G4, sedangkan 84 untuk GRI G3.1 Menurut Bhernadha *et al.*,(2017), model perhitungan CSR sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum x_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRI_j : CSR Indeks Perusahaan j

n_j : Jumlah kriteria (CSR) untuk perusahaan j

n_j GRI G4 = 91; n_j GRI G3.1 = 84

x_{ij} : Jumlah total pengungkapan CSR oleh perusahaan

1 = Jika kriteria diungkapkan; 0 = Jika kriteria tidak diungkapkan

Dengan demikian, $0 < CSRI_j < 1$

GRI merupakan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan di dunia dalam rangka mendorong transparansi yang lebih baik. Kerangka tersebut menetapkan prinsip dan indikator yang dapat dipergunakan oleh organisasi untuk

mengukur dan melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosialnya (Aziz, 2014).

2.3.3 Good Corporate Governance

2.3.3.1 Definisi Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perusahaan (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01/ MBU/ 2011 dalam Luthfilia *et al.*, 2015).

Menurut Muh (2009: 2), *Good Corporate Governance* diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

Berdasarkan OECD (*The Organization for Economic Corporation and Development*) penerapan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* terdiri atas 5 prinsip yaitu TARIF

(*transparency, accountability, responcebility, independency* dan *fairness*). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) *Transparency* (transparansi)

Adalah keterbukaan dalam melaporkan dan mengungkapkan informasi yang relevan dan transparan dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan.

2) *Accountability* (akuntabilitas)

Adalah kejelasan dari struktur, fungsi, sistem yang diterapkan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan keuangan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif.

3) *Responcebility* (pertanggungjawaban)

yaitu kepatuhan atau kesesuaian dalam pengelolaan manajemen sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

4) *Independency* (independensi)

Yaitu mengelola keuangan secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari berbagai pihak.

5) *Fairness* (keadilan atau kesetaraan)

Adalah *stakeholder* memperoleh hak-haknya berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan. Dimana semua pihak, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas harus memperoleh perlakuan yang sama, tanpa terkecuali.

Dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai kinerja bisnis yang optimal.

2.3.3.2 Indikator *Good Corporate Governance*

Menurut Dwipayani (2014) dan Helfina *et al.*, (2016) terdapat 5 indikator *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan sebagai berikut :

a) **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan institusi terhadap saham perusahaan. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengurangi konflik keagenan yang timbul antara pemegang saham dengan pihak manager (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Laksana,

2015). Keberadaan kepemilikan institusional perusahaan dapat meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Komposisi dari kepemilikan saham perusahaan berpengaruh terhadap *controlling system* pada suatu perusahaan (Adhi, 2002).

Pihak institusi merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki sumber daya besar. Kepemilikan institusional diukur dari presentase jumlah saham pihak institusi dari seluruh jumlah saham perusahaan Boediono (2005:175) dalam Helfina dkk (2016).

b) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari keseluruhan modal saham perusahaan yang dimiliki atau dikelola (Siallagan dan Machfoedz, 2006).

c) Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, pemegang saham pengendali dan anggota komisaris lainnya serta tidak terikat oleh hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memberi pengaruh atas kemampuan atau hak untuk bertindak independen atau bertindak yang semata-mata demi kepentingan dan kebutuhan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004).

Komisaris independen bertanggungjawab untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan (*corporate governance*) melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi secara efektif (Hapsoro, 2006). Setidaknya jumlah komisaris independen dalam perusahaan adalah 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen diukur dari presentase jumlah anggota komisaris dari seluruh jumlah dewan komisaris Ujiyantho dan Pramuka, (2007:10) dalam Helfina dkk (2016).

d) Jumlah Dewan Direksi

Dewan direksi adalah dewan yang dipilih oleh pemegang saham, bertugas untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola suatu perusahaan sesuai dengan tujuan para pemegang saham (Iqbal, 2007). Pengangkatan anggota dewan direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengelolaan perusahaan bergantung pada kinerja dan kebijakan dari dewan direksi. Tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota direksi adalah saling berkaitan dan mengikat serta merupakan tanggung jawab sesama anggota direksi pada perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyebutkan minimal terdapat 2 orang anggota direksi dalam perusahaan. Besar kecilnya perusahaan menentukan jumlah minimal anggota dewan

direksi. Dewan direksi diukur dari jumlah anggota direksi dalam perusahaan Hisamuddin dan Tirta (2012:125) dalam Helfina (2016).

e) Komite Audit

Dewan komisaris membutuhkan komite audit untuk membantu melakukan pengawasan dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit bertanggungjawab mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit juga menghubungkan para pemegang saham dan komisaris dengan manajemen dalam usaha menangani pengendalian. Paling tidak terdapat 1 anggota komisaris independen sebagai ketua komite audit dan 2 orang dari luar perusahaan sebagai anggota komite audit. Komite audit dalam suatu perusahaan dapat diukur dari jumlah anggota komite audit Oemar (2014:386) dalam Helfina (2016).

2.3.4 Kinerja Keuangan

2.3.4.1 Definisi Kinerja Keuangan

Menurut Nurhayati (2017), kinerja keuangan atau *financial performance* merupakan hasil dari suatu proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Salah satu parameter kinerja tersebut adalah laba. Laba bagi perusahaan sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Kegiatan operasional ini dapat terlaksana, jika perusahaan mempunyai sumber daya. Laba dapat

memberikan sinyal positif mengenai prospek perusahaan di masa depan. Dengan adanya pertumbuhan laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan memberikan sinyal yang positif terhadap kinerja perusahaan. Kinerja merupakan fungsi dari kemampuan organisasi untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya dalam berbagai cara untuk mengembangkan keunggulan kompetitif (Wijaya, 2012).

Pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kinerja perusahaan juga baik, karena laba merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan yang mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan hasil ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak-pihak lain yang menaruh perhatian atau memiliki kepentingan dengan data keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan dalam menilai kinerja perusahaan.

Dengan laporan keuangan, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan akan menjadi tepat, dengan demikian pemegang saham dapat menjadikannya sebagai informasi yang berguna dalam pengambilan keputusannya sebagai pemegang saham perusahaan (Nurhayati, 2017).

2.3.4.2 Indikator Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2013) bagi investor terdapat 3 rasio keuangan yang dapat dijadikan rujukan untuk melihat kondisi kinerja suatu perusahaan, yaitu:

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan.

2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola utangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali utangnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban dalam jangka panjangnya.

3) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk

mendapatkan keuntungan. Karena mereka mengharapkan dividen dan harga pasar dari sahamnya. Rasio ini untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan.

Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu (Setiawan, 2013). Rasio ini berguna untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Hal terpenting adalah menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2009).

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio dalam profitabilitas. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Return on assets (ROA) dianggap sebagai suatu ukuran efisiensi pengelolaan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan. Jika

rasio ini meningkat, manajemen cenderung dipandang lebih efisien dari sudut total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan. ROA dipilih sebagai proksi, karena rasio tersebut berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuangan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada (Robert, 1997 dalam Agrestya, 2012).

ROA diperoleh dari laba bersih sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar.

Menurut Faradina dan Gayatri (2012), untuk mengukur kinerja keuangan yang diukur dengan ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.4 Pengaruh Antar Variabel

2.4.1 Pengaruh Antara *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan

Bontis *et al.*, (2000) dalam Ulum *et al.*, (2008) menyatakan bahwa *Intellectual capital* merupakan keseluruhan modal yang dimiliki dari 3 elemen utama suatu perusahaan (*human capital, structural capital,*

customer capital) yang mana hal-hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang bisa memberikan nilai lebih yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan.

Penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu tolak ukur bagi suatu keberhasilan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan yang baik tidak hanya diukur berdasarkan besarnya aset berwujud yang dimiliki perusahaan, namun di era modern ini *intellectual capital* juga memiliki peran yang tidak kalah penting dengan aset berwujud perusahaan.

Dalam teori *stakeholder* pihak manajemen perusahaan diharuskan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki berupa fisik maupun intelektual secara maksimal agar dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Deegan, 2004 dalam Ulum, 2009). Pihak manajemen yang mengelola sumber daya dengan baik akan meningkatkan produktivitas dalam perusahaan. Jika produktivitas perusahaan meningkat maka pendapatan dan profit perusahaan juga akan meningkat. Meningkatnya pendapatan dan laba perusahaan dapat mengakibatkan *return on asset* (ROA) perusahaan juga meningkat. Hal ini bisa menjadi sinyal positif untuk investor dalam pengambilan keputusan investasi. Hal tersebut akan menguntungkan para *stakeholder* dan bagi pihak manajemen akan dinilai berhasil mengelola perusahaan dengan baik.

2.4.2 Pengaruh Antara Pengungkapan CSR Terhadap Kinerja Keuangan

Saat ini, perusahaan dituntut untuk memperhatikan peran stakeholder, sehingga perusahaan harus dapat menyelaraskan antara perusahaan dengan *stakeholder*, yaitu dengan mengembangkan program *corporate social responsibility*. CSR penting dilaksanakan oleh perusahaan, karena merupakan bentuk kepedulian perusahaan. Apabila perusahaan ingin bertahan dalam jangka panjang, maka perusahaan harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan para *stakeholder* dan turut berkontribusi secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan yang dikenal dengan konsep *triple bottom line* (Ariantini *et al.*, 2017).

Pengungkapan CSR merupakan salah satu cara untuk mengirimkan sinyal positif kepada *stakeholder*. Pengungkapan CSR juga berguna mengirimkan sinyal promosi atau informasi lain karena peduli dengan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari aktivitas perusahaan. Program CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan dalam membangun citra perusahaan dimata publik, baik masyarakat sekitar maupun investor.

Menurut Daud dan Abrar (2008) apabila sebuah perusahaan terlihat peduli kepada masyarakat, masyarakat juga akan membayangkan bahwa perusahaan tersebut juga memiliki kepedulian dalam mengelola produknya. Sehingga timbul kepercayaan akan kualitas produk dan akhirnya mengarah kepada loyalitas untuk menggunakan produknya. Hal

ini akan mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan yang diukur dengan meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan.

2.4.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Dwipayani (2014) dan Helfina Rimardhani *et al.*, (2016) terdapat 5 indikator dalam pengungkapan *Good Corporate Governance* yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional

Agency Theory merupakan konsep dasar dari kepemilikan institusional sebagai *corporate governance*. Pemegang saham institusional selaku *principal* akan mengoptimalkan pengawasan atas kinerja manajemen selaku *agent* dengan melakukan monitoring melalui laporan keuangan (Arifiani, 2013).

Semakin banyak *principal*, maka pengawasan terhadap kinerja *agent* semakin ketat. Pengawasan yang ketat, memotivasi *agent* untuk bekerja sesuai dengan perintah *principal*. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan antara *principal* dan *agent*. Rendahnya konflik keagenan dapat mengurangi *agency cost* yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Pengurangan *agency cost* berarti meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2. Kepemilikan Manajemen

Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari keseluruhan modal saham perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan antara *agent* dan *principal*, dengan cara mensejajarkan kepentingan-kepentingan pihak tersebut (Pratama dan Suputra, 2015).

Ketika manager mempunyai saham dalam perusahaan, berarti manager tersebut berperan sebagai *agent* sekaligus sebagai *principal*. Hal tersebut mendorong manager untuk lebih maksimal dalam mengelola perusahaan, sekaligus juga melakukan pengawasan. Peran ganda tersebut dianggap dapat mengurangi konflik keagenan yang mungkin terjadi. Rendahnya konflik keagenan dapat mengurangi *agency cost* yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Pengurangan *agency cost* berarti meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

3. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen dapat meminimalisir konflik keagenan dengan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara dewan komisaris atau antara pemegang saham dengan dewan komisaris (Pratama dan Suputra, 2015).

Komisaris independen merupakan posisi yang tepat sebagai penengah, karena tidak berafiliasi dengan pihak *principal* maupun *agent*,

sehingga dapat menyelesaikan perselisihan antar pihak berseteru dalam perusahaan. Adanya komisaris independen diharapkan mampu mengawasi jalannya perusahaan dan menengahi perselisihan yang mungkin terjadi antara *principal* dan *agent* (Amyulianthy, 2012). Keberadaan komisaris independen tentu akan menekan *agency cost* perusahaan. Penekanan *cost* tersebut dapat meningkatkan laba yang nantinya berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

4. Jumlah Dewan Direksi

Noviawan dan Aditya (2013) menunjukkan bahwa keberadaan dewan direksi dalam suatu perusahaan dapat berpartisipasi dalam menentukan strategi yang diterapkan dalam perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang serta meminimalisir konflik keagenan, sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dewan direksi yang berada dalam suatu perusahaan dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil, baik kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang (Laksana, 2015).

Dewan direksi bertugas untuk menentukan arah kebijakan maupun strategi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi melakukan fungsi monitoring terhadap kualitas pelaporan keuangan, sehingga meminimalisir konflik keagenan. Hal ini dapat menekan *agency cost*

perusahaan. Penekanan *cost* tersebut dapat meningkatkan laba yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

5. Komite Audit

Komite audit ini bekerja secara profesional dan independen yang pembentukannya bersifat fakultif, yakni dapat dibentuk, bukan bersifat imperatif (keharusan), sehingga terserah sepenuhnya kepada kebijakan dan pertimbangan dewan komisaris. Diketuai oleh komisaris independen. Bagi emiten atau perusahaan publik, wajib memiliki komite audit paling sedikit 3 orang.

Tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Tugas lainnya antara lain melakukan telaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan kepada publik, melakukan telaah atas kepatuhan terhadap UU, memberikan pendapat independen, memberikan rekomendasi penunjukan akuntan, melakukan pemeriksaan dan pelaksanaan audit internal serta pengawasan aktivitas manajemen risiko perusahaan.

Komite audit memiliki peran yang sangat besar bagi organisasi. Mengawasi pengelolaan organisasi terutama dalam hal keuangan dan

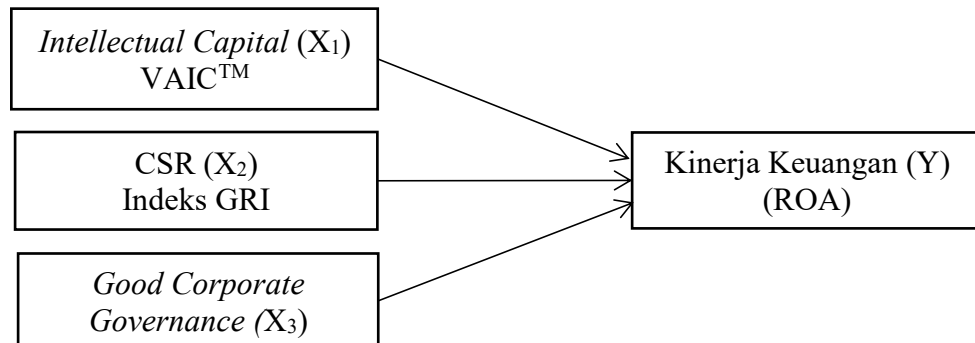
pengawas bagi auditor internal. Meskipun sudah terdapat auditor internal, namun masih dirasa kurang. Oleh karena itu, biasanya auditor internal bermitra dengan komite audit dalam setiap tugas dan laporan temuannya. Demikian juga dengan auditor eksternal, komite audit berperan dalam penunjukan, pengawasan dan pelaporan laporan keuangan, termasuk didalamnya jika terjadi perbedaan dengan manajemen, maka komite audit sebagai penengah.

Keahlian yang dimiliki oleh komite audit khususnya dalam bidang akuntansi dan keuangan menjadi faktor penentu bagi berjalannya proses pengawasan tersebut. Hal tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Sebaiknya komite audit diisi oleh para profesional yang handal dibidangnya. Tidak hanya kompeten, tetapi juga independen. Dengan demikian, adanya komite audit, maka kinerja perusahaan akan semakin terkontrol dan terkendali dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan ke depannya.

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance*. Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.6 Hipotesis

Menurut Sugiono (2013) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara, karena belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H1: *Intellectual Capital* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA)

H2: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA)

H3: *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA)